



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BEY TRIADI MACHMUDIN
2. Jabatan : DEPUTI KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA
3. NHK : 146039

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.650.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/79 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 365.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.530.954.534
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.645.954.534
III. HUTANG	Rp.	4.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.641.954.534

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.